

Analisis Pengaruh PAD dan Pendapatan Transfer Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lamongan

Rindyi Putri Lestari¹⁾, Ririt Iriani²⁾

¹⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail correspondence: 21011010130@student.upnjatim.ac.id^{*)}

e-mail correspondence: ririt.iriiani.ep@upnjatim.ac.id^{*)}

Received: 05-07-2025

Revised: 25-08-2025

Accepted: 31-08-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Capital expenditure is an important component of regional financial management aimed at improving public services and infrastructure development. This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Transfer Revenue on Capital Expenditure in Lamongan Regency during the period 2014–2023. The method used in this study is multiple linear regression using secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance. The results show that PAD has a significant negative effect on capital expenditure, indicating that an increase in PAD does not directly encourage an increase in capital expenditure. Conversely, transfer revenue has a significant positive effect on capital expenditure, showing that fund transfers from the central and provincial governments play a greater role in encouraging investment in capital expenditure. This study provides important implications for local governments in managing regional finances, particularly in increasing the effectiveness of PAD utilization and optimizing transfer revenue to support sustainable regional development.

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Modal, Keuangan Daerah

Abstrak.

Belanja modal merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2014-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak secara langsung mendorong peningkatan belanja modal. Sebaliknya, pendapatan transfer berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi lebih berperan dalam mendorong investasi untuk belanja modal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan PAD dan optimalisasi pendapatan transfer guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

INTRODUCTION

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan ini secara resmi mulai diterapkan sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya (Marlianita & Suji, 2020).

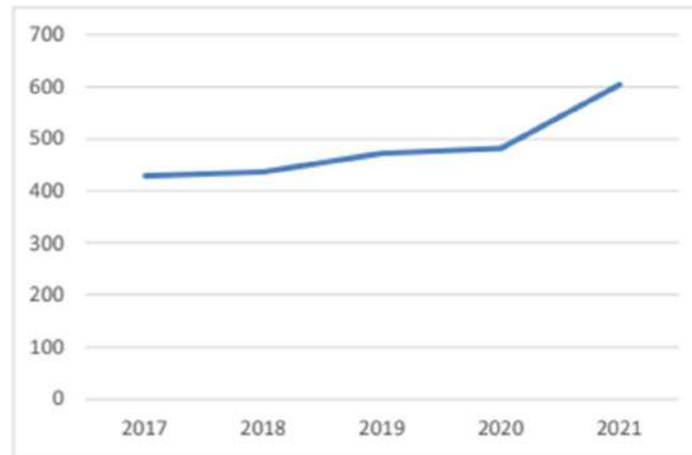
Dengan adanya kewenangan tersebut, daerah diharapkan mampu mandiri secara fiskal, administratif, maupun politik dalam mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah (Arthadela & Titik, 2023). Pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan sumber-sumber penerimaannya untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya melalui belanja modal.

Belanja modal merupakan bagian penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, gedung, jalan, peralatan dan fasilitas lainnya yang berfungsi mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Lathifa & Haryanto, 2019). Oleh karena itu, analisis terhadap alokasi belanja modal sangat penting dilakukan, terutama dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran publik. Tingkat alokasi belanja modal suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskalnya, yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, karena PAD berasal dari potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Secara teori semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula kapasitas daerah tersebut dalam membiayai pembangunan, termasuk dalam hal mengalokasikan belanja modal (Sudarmana & Gede, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan PAD akibat terbatasnya basis pajak dan retribusi, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya potensi ekonomi lokal. Tidak sedikit daerah yang lebih banyak menggunakan PAD untuk membiayai belanja operasional seperti gaji pegawai, biaya rutin perkantoran, dan subsidi, sehingga kontribusi PAD terhadap belanja modal menjadi sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih belum sepenuhnya terwujud dan peran dana dari luar daerah masih sangat dominan dalam membiayai belanja modal (Auliya & Sjarief, 2024). Untuk menutup keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pendapatan transfer ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang keseluruhannya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki PAD rendah. Transfer dana ini pada dasarnya dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan antar daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antar wilayah. Dalam kenyataannya, pendapatan transfer sering kali menjadi sumber utama dalam struktur pendapatan daerah, bahkan di banyak daerah kontribusinya bisa mencapai lebih dari 60% terhadap total pendapatan (Satria Maggara et al., 2024).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki fenomena menarik dalam pola pengelolaan keuangan daerahnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, PAD Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan selama periode 2017 – 2021.

Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2017 – 2023 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Grafik 1. menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp 429,20 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 604,59 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 10,68% per tahun. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Meskipun demikian, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah yaitu hanya berkisar 20,32% pada tahun 2021. Fenomena ini semakin menarik jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kabupaten Gresik misalnya, mencatat rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 32,91% pada tahun 2021, sementara Kabupaten Tuban mencapai 22,81%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi ke Kabupaten Lamongan mengalami fluktuasi tetapi masih menunjukkan kontribusi yang dominan terhadap total pendapatan daerah.

Grafik 2. Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2017 – 2021 (dalam Miliar Rupiah)



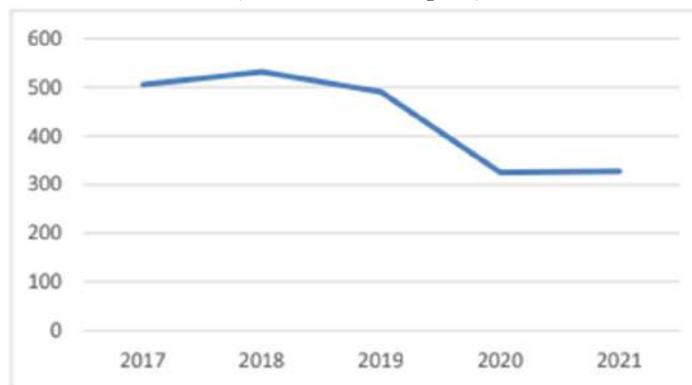
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021)

Berdasarkan Grafik 2. terlihat bahwa pada tahun 2017 total pendapatan transfer mencapai sekitar Rp 2.201,74 M atau sekitar 81,06% dari total pendapatan daerah. Jumlah ini kemudian mengalami fluktuasi pada tahun 2018 hingga 2020 dan terjadi peningkatan signifikan pada tahun

2021 mencapai Rp 2.249,49 M dengan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 75,61%. Kontribusi yang tinggi terhadap total pendapatan daerah mengindikasikan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Ketergantungan terhadap dana transfer ini menjadi fenomena umum yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Lamongan tetapi juga di kabupaten-kabupaten lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhor (2020) yang menyatakan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat karena rendahnya kapasitas PAD. Selain itu, Rusdiana (2017) juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer menyebabkan daerah memiliki ruang fiskal terbatas dalam mengatur belanja daerahnya secara mandiri.

Dalam hal belanja modal, Kabupaten Lamongan juga menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode tahun 2017 – 2021.

Grafik 3. Belanja Modal Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021
(dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021)

Grafik belanja modal Kabupaten Lamongan tahun 2017 – 2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2017, alokasi belanja modal Kabupaten Lamongan tercatat sebesar Rp 505,22 M dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi Rp 531,81 M. Namun, setelah itu terjadi penurunan secara bertahap, dimulai pada tahun 2019 yang turun menjadi sekitar Rp 490,43 M. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, di mana alokasi belanja modal anjlok hingga mencapai sekitar Rp 325,36 M. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2021 dengan jumlah belanja modal yang relatif stagnan pada angka yang hampir sama seperti tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi struktur dan prioritas anggaran. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD dan pendapatan transfer terhadap belanja modal di Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

RESEARCH METHODS

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen secara objektif menggunakan data numerik (Sujarweni, 2021). Data tersebut nantinya diolah menggunakan bantuan software SPSS 27, yang memfasilitasi analisis regresi untuk mengidentifikasi

tren, pola, dan menginterpretasikan hubungan antar variabel secara empiris dengan lebih cepat dan akurat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti data dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data utama meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan periode 2014-2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang relevan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan pemerintah daerah dan instansi terkait yang dipublikasikan secara resmi. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang terstruktur dan terstandarisasi, serta memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam analisis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis menjadi valid. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal. Uji hipotesis, termasuk uji t dan uji F, digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen dan pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (Ghozali, 2018).

Variabel dan Pengukuran Variabel

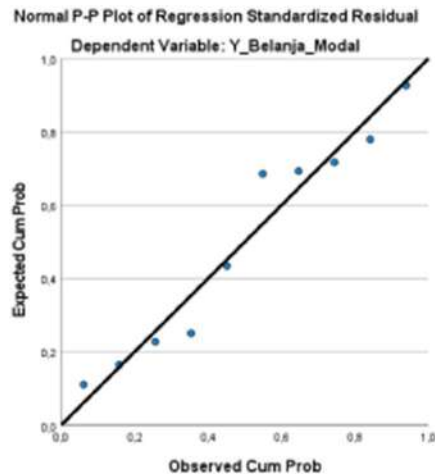
Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama. Variabel dependen adalah Belanja Modal (BM), yang diukur dari nilai realisasi belanja modal yang tercantum dalam APBD Kabupaten Lamongan dalam satuan mata uang (Rupiah). Variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dari nilai realisasi PAD dalam APBD Kabupaten Lamongan dalam satuan mata uang (Rupiah), dan Pendapatan Transfer (PT), yang diukur dari nilai realisasi pendapatan transfer yang diterima Kabupaten Lamongan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga dalam satuan mata uang (Rupiah).

RESULTS AND DISCUSSION (Hasil Dan Pembahasan)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji Normalitas digunakan untuk memberikan penilaian apakah sebaran data di suatu kelompok variabel atau data telah berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan gambar hasil uji normalitas yang telah dilakukan, dapat diamati bahwa titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data mengikuti garis diagonal dengan baik. Pola sebaran titik-titik tersebut menunjukkan kecenderungan yang konsisten untuk menyebar dan bergerak mengikuti arah garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Tidak terlihat adanya penyimpangan yang signifikan atau titik-titik yang menyebar jauh dari garis diagonal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

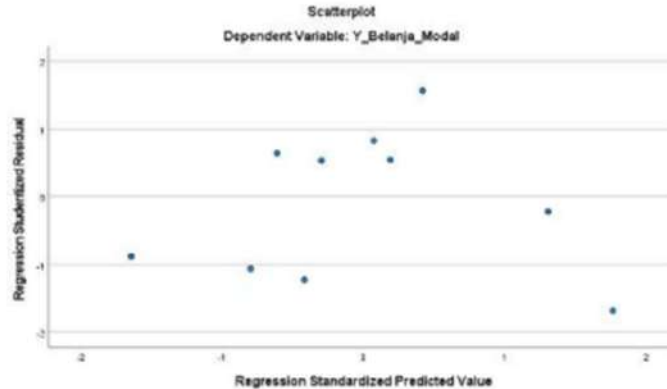
Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	,688	1,454
Pendapatan Transfer	,688	1,454

Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi antar variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terdapat korelasi di antara variabel bebasnya. Sebuah model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas ketika tolerance bernilai lebih besar dari 0,10 ataupun VIF bernilai kurang dari 10. Tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance 0,688 > 0,10 dan nilai VIF 1,454 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah dan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pola sebaran titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan sistematis serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasikan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga data layak dipakai.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,737

Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam uji run test suatu model regresi dikatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$. Tabel hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Sig. yaitu $0,737 > 0,05$ sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala atau masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	358,184	115,443		3,103	,017
PAD	-,588	,240	-,565	-2,455	,044
PT	,170	,046	,845	3,669	,008

Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer (PT) terhadap variabel terikat yaitu belanja modal. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda, persamaan model regresi dapat disusun sebagai berikut :

$$BM = 358,184 - 0,588 \text{ PAD} + 0,170 \text{ PT}$$

Persamaan model regresi tersebut memiliki arti:

- Dengan nilai konstanta sebesar 358,184 dapat diinterpretasikan bahwa ketika variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependen akan menjadi 358,184.
- Dengan koefisien regresi variabel PAD (X1) sebesar 0,588 yang negatif (-), dapat diinterpretasikan bahwa jika nilai variabel X1 meningkat, maka nilai variabel Y akan menurun, dan sebaliknya.
- Dengan koefisien regresi variabel PT (X2) sebesar 0,170 yang positif (+), dapat disimpulkan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan cenderung meningkat, dan sebaliknya.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Dererminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,824 ^a	,680	,588	65,05820

Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerapkan variasi pada variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Korelasi Berganda (R) yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0,824 artinya mempunyai hubungan kuat. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah 0,680 atau 68% artinya besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Pendapatan Transfer (X2) terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 68%, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

Keterangan	F	Sig.
Regresi	7,427	,019 ^b

Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Suatu model regresi dinyatakan cocok atau dapat digunakan apabila F hitung > F tabel atau nilai signifikan < probabilitas (Sig < 0,05). Dengan n-k = 8 dan k = 2 maka diperoleh F tabel sebesar 4,74. Pada tabel hasil uji F diketahui nilai F = 7,427 berarti F hitung > F tabel yaitu 7,427 > 4,74. Kemudian sesuai dengan tabel tersebut diketahui bahwa Sig

0,019, maka $0,019 < 0,05$. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa PAD (X1) dan Pendapatan Transfer (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Lamongan.

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
PAD	-2,455	,044	Berpengaruh Signifikan
PT	3,669	,008	Berpengaruh Signifikan

Sumber : Olah data SPSS 27 (2025)

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu model regresi dinyatakan cocok atau dapat digunakan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< probabilitas$ ($Sig < 0,05$). Dengan $n-k-1=7$ dan $\alpha=0,05$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,364. Pada tabel hasil uji t diketahui X1 memiliki nilai $t = -2,455$ berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,455 > 2,364$ dan $Sig > 0,05$ yaitu $0,019 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa PAD (X1) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Lamongan. Sementara itu, X2 memiliki nilai $t = 3,669$ berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,669 > 2,364$ dan $Sig > 0,05$ yaitu $0,008 < 0,05$ di mana memiliki arti bahwa variabel PT (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Lamongan.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak secara langsung mendorong peningkatan Belanja Modal. Sebaliknya, Pendapatan Transfer berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, menunjukkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi lebih berperan dalam mendorong investasi untuk Belanja Modal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong alokasinya ke sektor-sektor produktif seperti belanja modal, bukan hanya untuk belanja rutin. Selain itu, pemanfaatan pendapatan transfer yang terbukti mendukung peningkatan belanja modal perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui perencanaan yang matang, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal daerah agar PAD dan pendapatan transfer dapat lebih mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik secara berkelanjutan.

REFERENCES

Arthadela, M. N., & Titik, M. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 1-19.

Auliya, N. W., & Sjarief, H. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap

- Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2549-2558.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Data APBD*. Retrieved March 15, 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(2). <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Marlianita, Y., & Suji, A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25-35.
- Nadhor, R. A. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah (Studi Kasus pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2017-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1-38.
- Rusdiana, A. (2017). *Analisis Kemandirian Fiskal dalam Era Otonomi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur* [SKRIPSI]. Universitas Brawijaya.
- Satria Maggara, T., Kharisma Putri, B., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4). <https://journalpedia.com/1/index.php/jmd>
- Sudarmana, I. P. A., & Gede, M. S. (2020). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.104.p06>
- Sujarweni, V. W. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS & EKONOMI*. PUSTAKABARUPRESS.